

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada SKPD dan SKPKD di Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun pada Tahun Anggaran 2015, melalui analisis prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset dan prosedur akuntansi selain kas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di tingkat SKPD pada Tahun Anggaran 2015 belum sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini terlihat jelas dari hasil penelitian yang menunjukkan perolehan tingkat kesesuaian masing-masing prosedur akuntansi berada di bawah 100%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD, penerapan hanya berada pada tingkat kesesuaian sebesar 50%;
- b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD, penerapan hanya berada pada tingkat kesesuaian sebesar 57%;
- c. Prosedur akuntansi aset pada SKPD, penerapan hanya berada pada tingkat kesesuaian sebesar 38%; dan
- d. Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD, penerapan hanya berada pada tingkat kesesuaian sebesar 40%;

Sementara untuk penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada SKPKD, melalui analisis prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset, prosedur akuntansi selain kas dapat disimpulkan telah sangat sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana tingkat kesesuaian masing-masing prosedur akuntansi tersebut telah mencapai 100%. Berikut rincian capaian tingkat kesesuaian masing-masing prosedur akuntansi tersebut:

1. Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD dengan tingkat kesesuaian mencapai 100%;
2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD dengan tingkat kesesuaian mencapai 100%;
3. Prosedur akuntansi aset pada SKPKD dengan tingkat kesesuaian mencapai 100%; dan
4. Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD dengan tingkat kesesuaian mencapai 100%.

Hal ini dapat tercapai karena selain dukungan dari para fungsi akuntansi SKPKD, juga telah digunakannya aplikasi SIPKD oleh fungsi akuntansi terkait secara efektif dan efisien.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah sampel yang sedikit, sehingga walaupun telah diambil berdasarkan keterwakilan sampel, namun hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisir.

5.3 Saran

Dari hasil analisis dan wawancara penelitian, agar penatausahaan sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dapat berjalan lebih optimal, efektif dan efisien, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kapasitas SDM PKN-APIP, agar tercipta SDM yang memiliki kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan yang handal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
2. Peningkatkan peran APIP (Inspektorat Kabupaten dan BPKP Perwakilan Jambi) untuk menerapkan prinsip pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien.
3. Untuk Tahun Anggaran 2016 dan tahun-tahun anggaran berikutnya, diharapkan Pemda Sarolangun dapat meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel, melalui monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi SIPKD secara periodik agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan handal.
4. Perlu dilakukan pelatihan yang berkelanjutan bagi para pengelola keuangan daerah, untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM baik pada tingkat SKPD maupun pada SKPKD dengan lembaga resmi seperti kerjasama yang lebih intens lagi dengan Kemendagri dan BPKP serta pihak-pihak yang berkompeten lainnya.

5. Jika memungkinkan, perlu dilakukan evaluasi dalam penetapan/penempatan para fungsi akuntansi terkait baik pada SKPD maupun pada SKPKD, agar pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dapat berjalan lebih efektif, efisien dan ekonomis.
6. Pada SKPKD, perlu dilakukan evaluasi terkait dengan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan membentuk bidang akuntansi dan pelaporan.
7. Untuk penelitian selanjutnya, agar melakukan penelitian secara rinci dan menyeluruh pada semua SKPD serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tersebut.

